PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB.MAGETAN TAHUN 2018 – 2023

SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

Jalan Tri Pandita No. 17 Magetan 63319

Telp. 0351 – 895049 Fax. 0351.895049

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 5 tahun ke depan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2018 – 2023 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya. Di dalam Renstra ini merumuskan Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah – langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten Magetan ***"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA"***

Dengan terbitnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah oleh karena itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja.

Semoga dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Magetan sampai dengan 5(lima) tahun kedepan.

Magetan, 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUCIPTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630714 199403 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 21

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 40

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 42

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... 46

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 47

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis 49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 51

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....

6.1 Matrik Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 54

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 85

BAB VIII: PENUTUP 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan di Kabupaten Magetan untuk lima tahun kedepan difokuskan pada 6 (Enam) program unggulan yaitu Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART, Pengembangan Potensi Daerah melalui Triple Agro dan Sinergis, Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Semakin Sehat dan Usaha Mikro (UM) untuk Naik Kelas (Menjadi Usaha Kecil), Peningkatan Keperpihakan terhadap Kegiatan Investasi Daerah terhadap Kegiatan Investasi Daerah agar mempercepat Kabupaten Magetan sebagai Daerah yang Ramah dan Menarik Investasi dan Pemberdayaan Desa Mandiri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan turut mendukung program prioritas daerah melalui sektor Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan memiliki potensi yang cukup besar di bidang Industri kecil dan industri rumah tangga. Karena disadari atau tidak industri kecil dan industri rumah tangga banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu keberadaannya harus terus di dukung dengan membantu mengurangi faktor penghambat pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga. Selama ini sektor industri yang memiliki prospek bagus antara lain : kerajinan alas kaki/kulit, kerajinan bamboo dan produk makanan olahan. Pada sektor perdagangan Pemerintah Kabupaten Magetan terus berupaya membantu para pengusaha dengan memperlancar arus barang dan jasa untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Kabupaten Magetan masuk di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan prioritas pembangunan antara lain:

- ✓Pembukaan interchange Tol ruas Ngawi - Madiun di Kecamatan Kartoharjo;
- ✓Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan;
- ✓Pembangunan Kawasan Aneka Industri Kulit dan Pengolahan Limbahnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut Kabupaten Magetan harus segera mempersiapkan semua kebutuhan pendukung program prioritas RPJMN agar dapat terlaksana percepatan pertumbuhan perekonomian sehingga kabupaten Magetan tidak

tertinggal dengan beberapa daerah lain sebagai Kabupaten terkecil ke dua dan paling barat di Jawa Timur.

Ketentuan Pasal 342, Ayat (1), huruf (c) dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar. Lebih lanjut dinyatakan dalam Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah: (i) mencakup terjadinya bencana alam, (ii) goncangan politik, (iii) krisis ekonomi, (iv) konflik sosial budaya, (v) gangguan keamanan, (vi) pemekaran daerah, atau (vii) perubahan kebijakan nasional;

Berdasarkan ketentuan diatas dasar dari perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah adanya krisis ekonomi global sebagai dampak pandemic covid 19 sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap target-target indikator pembangunan daerah, kemudian perlunya penyesuaian dengan kebijakan yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 maupun penyesuaian dengan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaiman telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam kepmendagri nomor 050-3708 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DInas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2018 – 2023 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah :

1.Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

2.Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan

3.Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;

4.Menetapkan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Kepala Perangkat Daerah;

5.Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan dengan Renstra Perubahan pada Disperindag Tahun 2018 - 2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disperindag Kabupaten Magetan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 – 2023 disusun menurut sistematika sbb :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Perangkat Daerah.

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan.
2. Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
4. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
5. Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dengan sistematika sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi menjadi 4 Bidang yang masing-masing Bidang dipimpin oleh 1 orang kepala bidang.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat dilihat dibawah ini.:

2) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar ;
b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar ;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.;
d. Pelaksanaan pemberian izin kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.;

g. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran serta pengembangan kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM); dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Tugas Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;

b. penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;

c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;

d. pengelolaan urusan kepegawaian;

e. pengelolaan urusan keuangan;

f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;

h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;

i. pengoordinasian penyusunan program setiap bidang;

j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;

b. pengadaan barang dan jasa;

c. melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
g. mengurus kenaikan pangkat pegawai;
h. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
i. mengurus kesejahteraan pegawai; dan
j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Tugas Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;
b. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan;
c. melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
e. menyusun laporan hasil kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Tugas Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
b. menyiapakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
c. menyelenggarakan tata usaha keuangan;
d. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
e. menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
f. menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
g. melaksanakan evaluasi anggaran; dan
h. melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Tugas Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK)

Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

Penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/ rekomendasi Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri;
d. pelaksanaan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan IKM dan sentra sentra industri;
e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
g. pelaksanaan pembinaan SDM industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri;
h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Kepala Seksi Industri Pangan dan Kulit

Kepala Seksi Industri Pangan dan Kulit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang pangan dan produk kulit;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pangan dan produk kulit;
c. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri pangan dan produk kulit;
d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri pangan dan produk kulit;

e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri pangan dan kulit;
f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri pangan dan produk kulit;
g. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri pangan dan produk kulit;
h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri pangan dan produk kulit;
i. melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri pangan dan produk kulit;
j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan dan produk kulit; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Tugas Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Kerajinan

Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Kerajinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang industri hasil hutan dan kerajinan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang hasil hutan dan kerajinan;
c. melaksnakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri hasil hutan dan kerajinan;
d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri hasil hutan dan kerajinan;
e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri hasil hutan dan kerajinan;
f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri hasil hutan dan kerajinan;
g. melaksnakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri hasil hutan dan kerajinan;
h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri hasil hutan dan kerajinan;
i. melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri hasil hutan dan kerajinan;
j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil hutan dan kerajinan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5) Tugas Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA)

Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan ijin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi tanda daftar industri dan ijin usaha industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
g. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatakan kegiatan industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Kepala Seksi Industri Sandang dan Aneka

Kepala Seksi Industri Sandang dan Aneka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang sandang dan aneka;

b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan kegiatan pengembangan usaha bidang sandang dan aneka;

c. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri sandang dan aneka;

d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri sandang dan aneka;

e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang dan aneka;

f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri sandang dan aneka;

g. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan aparatur industri sandang dan aneka;

h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri sandang dan aneka;

i. melakukan pembinaan sumber daya manusia, industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang dan aneka;

j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri sandang dan aneka; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Tugas Kepala Seksi Industri Bahan Bangunan dan Logam

Kepala Seksi Industri Bahan Bangunan dan Logam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam;

b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang bahan bangunan dan logam;

c. melaksnakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri bahan bangunan dan logam;

d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri bahan bangunan dan logam;
e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri bahan bangunan dan logam;
f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri bahan bangunan dan logam;
g. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri bahan bangunan dan logam;
h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri bahan bangunan dan logam;
i. melakukan pembinaan sumber daya manusia, industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri industri bahan bangunan dan logam;
j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6) Tugas Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan di bidang perdagangan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan, metrologi legal dan melaksanakan pengawasan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
b. penyiapan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha perdagangan;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan;
d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi izin perdagangan;
e. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi distribusi barang;
f. penyusunan database setiap jenis barang dan jasa;
g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
h. pelaksanaan fasilitasi distribusi barang produk;
i. pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian metrologi legal dan sarana / prasarana;

j. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen ke pemerintah provinsi;dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal

Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
c. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
d. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
e. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
f. melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
g. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasar dan melaksanakan operasi pasar;
h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan metrologi legal tera dan tera ulang;
i. melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida;
j. melaksanakan pengawasan mutu dagangan kaki lima dan asongan;
k. melaksanakan penyuluhan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan;
l. melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah kelancaran distribusi perdagangan dan melaksanakan distribusi barang produk/pasar murah bersubsidi;
m. melaksanakan fasilitasi proses penyelesaian sengketa konsumen ke pemerintah provinsi;
n. melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
o. menyusun informasi database barang dan jasa;
p. menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan;dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Tugas Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan

Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan promosi dan kemitraan;
b. melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan promosi dan kemitraan;
c. memfasilitasi usaha industri kecil menengah serta mempromosikan dan memasarkan hasil produk;
d. menyusun profil produk hasil usaha industri kecil menengah;
e. mengevaluasi terhadap hasil produk usaha industri kecil menengah sebagai dasar peningkatan mutu produk;
f. melaksanakan pembinaan kepada usaha industri kecil menengah dalam pengembangan hasil produk;
g. melaksanakan fasilitasi dalam angka pengembangan produk dan kegiatan temu usaha;
h. menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan Promosi dan Kemitraan; dan
i. menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah;
j. melaksanakan koordinasi dalam rangka membangun kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah dalam bentuk temu usaha;
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah;
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri kecil menengah;
m. melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama antara lembaga penyandang dana dengan usaha industri kecil menengah; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6) Tugas Bidang Pasar

Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

Merumuskan kebijaksanaan, pembinaan, mengelola dan mengembangkan pasar daerah, menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat, menyediakan tempat untuk berjualan dan berbelanja, menyelenggarakan penarikan, pungutan retribusi, sewa dan jasa pasar lainnya, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan bidang pasar
b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah, menyusun program dan kebijaksanaan teknis dan program kerja;
c. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggrakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan yang berlaku;
d. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

a. merencanakan, merumuskan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
b. merencanakan, merumuskan perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan pasar; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Tugas Kepala Seksi Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban

Kepala Seksi Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana penerimaan retribusi, sewa los dan bedak pasar;
b. melaksanakan pembinaan teknis pemungutan;

c. meneliti dan memberikan pertimbangan ijin penggunaan tempat berjualan di kawasan pasar (surat keterangan penempatan hak tempat jualan (SKHPTJ));
d. membina dan mengendalikan ketertiban dan keamanan pedagang di dalam pasar;
e. melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan di dalam pasar dalam radius 200 m;
f. melakukan penyegelan dan pembukaan kembali bedak dan fasilitas pasar lainnya yang bermasalah setelah memenuhi persyaratan administrasi;
g. menjaga dan mengawasi kebersihan, pemeliharaan dan perawatan bangunan beserta fasilitas lainnya di lingkungan pasar;
h. melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ke tempat penampungan sampah sementara; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

UPTD

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan; dan
   3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, yang membawahi :
   1)Seksi Pangan dan Kulit; dan
   2) Seksi Hasil Hutan dan Kerajinan.

d. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka yang membawahi :
   1) Seksi Sandang dan Aneka; dan
   2) Seksi Bahan Bangunan dan Logam.
e. Bidang Perdagangan, yang membawahi :
   1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal; dan
   2) Seksi Promosi dan Kemitraan.
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya untuk masing-masing sub bagian maupun seksi dibentuk oleh para staf pelaksana. Untuk lebih memperjelas struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberadaan Aparatur sebagai lokomotif pengerak pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Magetan adalah sebanyak 80 (delapan puluh) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan informasi sebagai berikut :

1. Keberadaan SDM (personil)
   a. Susunan Kepegawaian yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berdasarkan pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana/S2	Magister Hukum	1 orang
2	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen	1 orang
3	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
4	Sarjana/S1	Ekonomi	9 orang
5	Sarjana/S1	Teknik Industri	5 orang
6	Sarjana/S1	Mesin	2 orang
7	Sarjana/S1	Sosial	8 orang
8	Sarjana/S1	Hukum	1 orang
9	Sarjana/S1	Teknik Elektro	1 orang
10	Sarjana/S1	SSTP	1 orang
11	Sarjana/S1	Administrasi Negara	1 orang
12	Ahli Madya/D3	Akademi Kesehatan Lingkungan	1 orang
13	Ahli Madya/D3	Teknik Mesin	1 orang
14	Ahli Madya/D3	Teknik Kulit	1 orang
15	SMK	Akuntansi	2 orang

16	SMK	Administrasi	3 orang
17	STM	Mesin	2 orang
18	SMA	IPA	7 orang
19	SMA	IPS	13 orang
20	SLTP	-	5 orang
			66 orang

b. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat Struktural.

	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM II	1	
2.	Diklat PIM III	4	
3.	Diklat PIM IV	12	
	Jumlah	17	

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	
5	Pembina (IV/a)	6	
6	Panata Tingkat I (III/d)	9	
7	Penata (III/c)	8	
8	Panata Muda Tingkat I (III/b)	2	
9	Penata Muda (III/a)	15	
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	14	
11	Pengatur (II/c)	2	
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	5	
13	Pengatur Muda (II/a)	1	
14	Juru Tingkat I (I/d)	3	
15	Juru (I/c)	-	
Jumlah		66	

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :

	Tingkatan Eselon	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	11	Kepala Seksi
4	Staf	49	
Jumlah		66	

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan profesional. Demikian pentingnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Magetan. Tanpa Itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

a. Sarana

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Kendaraan Roda 3	13 unit
3.	Kendaraan Roda 2	14 unit
4.	Gerobak Sampah	20 unit
5.	Lemari Penyimpan	3 buah
6.	Mesin Ketik Elektrik	17 buah
7.	PC Unit	15 unit
8.	Laptop	4 buah
9.	Notebook	11 buah
10.	Printer	28 buah

11.	Camera Digital	4 buah
12.	Filling Kabinet	42 buah
13.	Lemari	9 buah
14.	Meja Kerja	64 buah
15.	Kursi Kerja	64 buah
16.	Meja Komputer	7 buah

1. Prasarana

Prasarana yang dikuasai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan :

b.1. 16 Pasar Daerah

- Pasar Baru Magetan
- Pasar Sayur I Magetan
- Pasar Sayur II Magetan
- Pasar Plaosan I
- Pasar Plaosan II
- Pasar Panekan
- Pasar Parang
- Pasar Rejosari
- Pasar Takeran
- Pasar Lembeyan
- Pasar Gorang Gareng
- Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati
- Pasar Manisrejo
- Pasar Mangge
- Pasar Maospati I
- Pasar Maospati II

b.2 5 Pasar Hewan

- Pasar Hewan Gorang Gareng
- Pasar Hewan Parang
- Pasar Hewan Plaosan
- Pasar Hewan Panekan
- Pasar Hewan Maospati

b.3 2 Kantor

- Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan
- Kantor UPTD Tera

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Bidang Industri

Pembangunan di sektor industri di dominasi oleh usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT). Hampir diseluruh kecamatan ada kegiatan industri tersebut. Meskipun kegiatan usaha ini tergolong kecil menengah, produk dari masing-masing jenis usaha kecil tetapi jumlah unit usaha cukup banyak sehingga merupakan potensi yang besar.

Unit usaha yang merupakan potensi yang besar antara lain penyamakan kulit, kerajinan kulit, kerajinan bambu, kerajinan genteng, kerajinan gamelan, kerajinan batik, dan makanan olahan. Data berikut disampaikan perkembangan unit usaha industri :

Potensi bidang industri

Tahun

No.	Jenis Data	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Pertumbuhan Industri					
1	Barang Kulit	132	317	359	360	226
2	Kerajinan anyaman bambu	5,581	5,626	5,706	5,710	5,730
3	Pengolahan Pangan	2,346	2,412	2,480	2,481	2,982
4	Konveksi (jahit, bordir)	130	130	130	132	231
5	Batik Tulis	2	3	4	4	4
6	Pengolahan Kayu	228	228	228	228	253
7	Galian bukan logam (Genteng, batu bata, grabah, barang dari semen, kerajinan kaca/grafir, pecah batu)	5,532	5,587	5,641	5,676	5,734

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Kelompok pengrajin merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu atau kelompok masyarakat yang pekerjaanya membuat barang-barang kerajinan. Bina kelompok pengrajin diselenggarakan dengan tujuan agar kelompok pengrajin dapat meningkatkan produktivitasnya.

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	*Cakupan bina kelompok pengrajin*	*Tahun*				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan/ binaan pemda	45	46	53	64	61
2	Jumlah IKM	14.764	15.037	15.247	15.325	15.895
3	Cakupan bina IKM	0,30	0,31	0,35	0,42	0,38

Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Magetan memiliki perkembangan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Magetan mencapai angka 0,30 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 0,42 pada tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Magetan mengalami penurunan menjadi 0,38. CAkupan bina kelompok Pengerajin ini juga didukung juga oleh kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi sesuai data berikut:

Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi

No	*URAIAN*	*Satuan*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
1	Jumlah kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	IKM	18	50	90	95	117
2	Jumlah kelompok alih profesi yang mengajukan pembinaan dan meminta bantuan	IKM	80	130	210	180	156
3	persentase	%	23	38	43	53	75

Grafik Jumlah IKM Mendapat Bantuan/Binaan Pemda di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

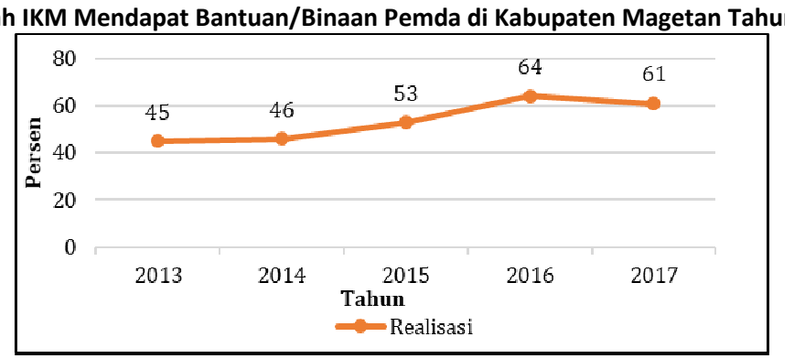

Persentase IKM yang Difasilitasi Sertifikasi

Sertifikasi Industri Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas IKM dalam membuat produk sehingga disukai konsumen serta memiliki daya saing yang kuat di pasar dalam maupun luar negeri. Selain itu, adanya sertifikasi berguna untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup (K3L).

Persentase IKM yang Difasilitasi Sertifikasi di Kabupaten Magetan

No	*Persentase IKM yang bersertifikasi*	*Tahun*				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah IKM yang bersertifikasi	yg difasilitasi uji limbah	yg difasilitas i uji	Tidak ada kegiatan fasilitasi	Tidak ada kegiatan fasilitasi	43
2.	Jumlah IKM	-	-	-	-	15.895
3.	Persentase	-	-	-	-	0,16

Pada tahun 2017, persentase IKM yang difasilitasi sertifikasi di Kabupaten Magetan adalah sebesar 0,16%. Melihat pentingnya IKM yang bersertifikasi, pemerintah Kabupaten Magetan saat ini sedang dalam upaya untuk meningkatkan jumlah IKM yang bersertifikasi.

Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan

Pertumbuhan industri kecil di Kabupaten Magetan pada tahun 2014-2016 masih relatif rendah, yaitu berkisar antara 0,5 % sampai 1,85 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 3,37%. Dengan kondisi perekonomian yang cenderung stabil diharapkan pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan industri kecil semakin naik terutama yang mendukung sektor pariwisata.

Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertumbuhan Industri Kecil	%		1,27	1,40	0,51	3,37

Kecilnya Fasilitas sarana dan prasarana produksi juga memiliki andil dalam produktivitas industri kecil dari keseluruhan industry yang di bina hanya sedikit yang bisa berkembang dikarenakan minimnya sarana produksi yang ada, sehingga kurang bersaing dengan industry dari luar daerah. Sesuai dengan data industry kecil yang berkembang, industry kecil yang menerapkan teknologi industry,sebagai berikut:

Persentase Industri Kecil yang berkembang

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri Kecil yang	IKM	-	15	20	25	30
2	industri kecil yang dibina	IKM	-	46	53	64	61
3	Persentase	%	-	33	38	39	49

Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri (%)

No.	*Uraian*	*Satuan*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
1.	Industri yg menerapkan teknologi industri yg dibina	IKM	30	50	80	40	115

2.	Jumlah seluruh Industri yang di bina teknologi industrinya	IKM	60	80	125	62	165
3.	Persentase	%	50	63	64	65	70

IKM yang mendapatkan implementasi iptek (%)

No.	*Uraian*	*Satuan*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
1	jumlah industri yg mengimplementasikan iptek yang diberikan	IKM	2	1	5	2	11
2	jumlah industri kecil yang diberikan pelatihan iptek	IKM	9	2	12	3	14
3	Persentase	%	22	50	42	67	79

Nilai Produksi Industri Kecil

Nilai produksi industri kecil di Kabupaten Magetan tahun 2013 sebesar Rp. 645.742.145.500 terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 728.005.469.350.

Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai Produksi Industri Kecil	Rp.	645.742.145.500	654.601.036.150	667.650.035.000	699.907.337.950	728.05.469.350

3.2.2 Bidang Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pedagang besar maupun pedagang kecil. Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan daerah sehingga memiliki peran yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah.

Pembangunan sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta memberikan sumbangan yang sangat cukup dalam penerimaan pendapatan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan.

Dibawah ini disampaikan data perkembangan sektor Perdagangan :

Realisasi Retribusi Pasar

NO	Sumber/Unit Penghasil	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Pasar Umum	2,397,819,200	2,411,308,900	2,669,420,400	2,990,263,700
2	Pasar Hewan	111,289,000	111,580,000	112,742,000	122,819,400
3	Parkir umum dan khusus	439,014,000	473,322,000	590,548,000	1,018,719,000
4	Tera/tera ulang				86,985,000
	Jumlah	2,948,122,200	2,996,210,900	3,372,710,400	4,218,787,100

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

Kelompok pedagang merupakan kumpulan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang, yaitu orang yang memperjual belikan barang untuk memperoleh suatu keuntungan. Bina kelompok pedagang/ usaha informal merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari para pedagang sehingga produktivitasnya meningkat.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	2	3	16,9	11,1	6,1

Grafik Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

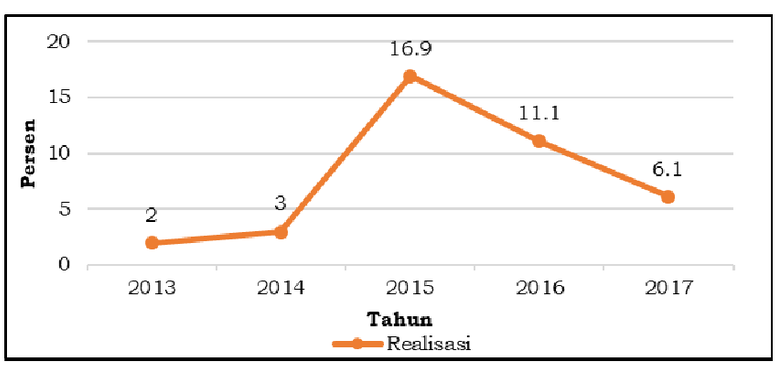

Sumber : Data Olahan, 2018

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Magetan memiliki perkembangan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Kabupaten Magetan mencapai angka 2% dan meningkat menjadi 3% pada tahun 2014. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 16,9% pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 cakupan bina kelompok

pedagang/ usaha informal Kabupaten Magetan mengalami penurunan menjadi 11,1%. Angka tersebut kemudian menurun kembali menjadi 6,1% pada tahun 2017.

Persentase UTTP Bertanda Tera Sah

UTTP merupakan singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. UTTP adalah alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. UTTP membutuhkan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sahnya UTTP untuk dipergunakan.

Persentase UTTP Bertanda Tera Sah di Kabupaten Magetan

No	*Persentase UTTP bertanda tera sah*	*Satuan*	*Tahun*				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah UTTP yang ditera sah	UTTP	-	-	-	-	323
2	Jumlah UTTP di Kabupaten Magetan	UTTP	-	-	-	-	52.090
3	Persentase	%	-	-	-	-	0.62

**Untuk tahun 2013 s.d 2016 tidak ada data karena UTTP bertanda terra/ulang sah menjadi kewenangan propinsi, baru pada tahun 2017 menjadi kewenangan kabupaten.*

Pada tahun 2017, persentase UTTP Bertanda Tera Sah di Kabupaten Magetan adalah sebesar 0,62%. Melihat pentingnya UTTP Bertanda Tera Sah, pemerintah Kabupaten Magetan saat ini sedang dalam upaya untuk meningkatkan jumlah UTTP Bertanda Tera Sah. Dilihat dari total barang yang di pantau (makanan dan minuman, pupuk bersubsidi, LPG, UTTP) berikut persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau sebagai berikut:

Persentase Peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau

NO	*URAIAN*	*Satuan*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
1	Total Barang Tidak Layak	Unit	17,141	17,848	20,843	51,771	29,094
2	Total Barang Yang Dipantau	Unit	52,170	52,170	52,170	52,170	52,170
3	Persentase	%	33	34	40	99	56

**Untuk tahun 2017 banyak yang tidak layak dikarenakan tahun pertama UTTP bertanda terra/ulang sah menjadi kabupaten.*

Disamping barang di pantau (makanan dan minuman, pupuk bersubsidi, LPG, UTTP) secara khusus rutin anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dilakukan monitoring peredaran barang kena cukai illegal, berikut datanya:

Peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau

No.	*Uraian*	***Satuan***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***
1	Jumlah barang kena cukai ilegal yang ditemukan	IKM	0	0	0	1	0

2	Jumlah seluruh barang kena cukai ilegal yg terpantau	IKM	360	360	360	360	360
3	Persentase	%	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0

Persentase Pasar Kondisi Baik

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jualbeli barang atau jasa. Persentase pasar dengan kondisi baik di Kabupaten Magetan sebagai berikut.

Persentase Pasar Kondisi Baik Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	*Indikator*	*Satuan*	*Tahun*				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pasar Kondisi Baik	%	40	47	60	69	81

Persentase pasar dengan kondisi baik di Kabupaten Magetan untuk periode tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 persentase pasar dengan kondisi baik berada di angka 40% dan terus meningkat menjadi

Grafik Persentase Pasar Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

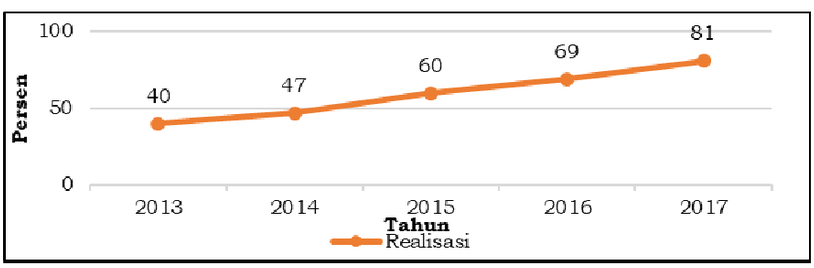

Sumber : Data Olahan, 2018

Capaian Persentase pasar dengan kondisi baik di Kabupaten Magetan belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 capain pasar dengan kondisi baik dapat memenuhi target yang ditentukan, bahkan melebihi. Sementara itu, pada tahun 2016 memiliki nilai capaian sebesar 98,58%.

Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Magetan, jumlah usaha perdagangan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui pertumbuhan usaha perdagangan di kabupaten Magetan, berdasarkan data padata tahun 2013-2017 pertumbuhan usaha perdagangan adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	*Indikator*	*Satuan*	*Tahun*				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	-	15,69	12,08	11,80	19,19

Rasio Ketersediaan Los/Bedak Di Pasar Daerah

Rasio Ketersediaan Los/Bedak Di Pasar Daerah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 data belum tersedia, akan tetapi pada periode RPJMD 2018-2023 telah ditargetkan.

Jumlah Pasar di Kabupaten Magetan

No.	Jenis Pasar	Jumlah				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Pasar Desa	51	51	51	51	51
2	Pasar Umum	16	16	16	16	16
3	Pasar Hewan	5	5	5	5	5

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5 di Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table berikut:

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PK5 Yang Menempati Tempat Berjualan Khusu PK5	pedagang	-	-	64	64	64
2.	Jumlah PK5	pedagang	-	-	522	1.072	1.959
3.	Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5	%	-	-	12,26	5,97	3,26

Pendataan PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5 mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 sebanyak 64 pedagang, pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima terus bertambah sehingga angka persentase jumlah PK5 yang menempati tempat khusus PK5 belum ada ada peningkatan atau menurun.

Jumlah Pelaksanaan Pameran

Pameran mrupakan suatu kegiatan penyajian hasil karya sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Indikator pelaksanaan pameran merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan per tahun. Berikut ini merupakan jumlah pelaksanaan pameran di Kabupaten Magetan.

Jumlah Pelaksanaan Pameran di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelaksanaan pameran	kali	7	11	8	11	10

Jumlah pelaksanaan pameran di Kabupaten Magetan selama lima tahun terakhir memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun awal, jumlah pelaksanaan pameran di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan dari 7 buah pada tahun 2013 menjadi 11 buah pada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah pameran mengalami penurunan menjadi 8 buah, namun demikian angka tersebut meningkat kembali menjadi 11 buah pada tahun 2016. Setelah sempat mengalami peningkatan, jumlah pelaksanaan pameran di Kabupaten Magetan mengalami penurunan menjadi 10 buah pada tahun 2017.

Produk UKM yang Masuk Pasar Modern

Di Kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2017 belum ada produk IKM yang masuk pasar modern, dikarenakan produk UKM belum bisa memenuhi kuota yang ditargetkan oleh pasar modern, akan tetapi akan ditargetkan pada periode RPJMD tahun 2018-2023.

Tabel T-C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Perdagangan**									
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan				2088786.17	2198490.29	2200293.7	2200293.7	105%	100%
	Persentase Pasar Kondisi Baik				50	55	46.2	60	92%	109%
	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah				0.84	0.86	0.85	0.86	101%	100%
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan				7.08	7.09	7.13	12.28	101%	173%
	Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya				5.4	6.3	6%	11%	1%	2%
	Persentase Produk IKM yang Masuk Pasar Modern				10	20	18	0	180%	0%
2	**Perindustrian**									
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan				0.175	0.18	0.58	0.12	331%	67%
	Nilai Produksi industri kecil				730,519,253,000	731,834,189,000	730,507,686,000	731,834,686,000	100%	100%

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Disperindag tahun 2014-2018 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada 1 target kinerja yang tidak tercapai, yakni Persentase Produk IKM yang masuk pasar modern pada Kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2019 sudah ada 18 produk IKM yang masuk pasar modern, upaya ini terus ditingkatkan melalui progam dan kegiatan sesuai yang telah ditargetkan pada periode RPJMD tahun 2018-2023, akan tetapi pada tahun 2020 tidak ada produk IKM yang masuk di pasar modern dikarenakan kendala pandemic dari pihak toko modern sementara tidak menerima produk dari luar kota.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal program dan kegiatan) pada tahun 2014-2018 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan Perangkat Daerah (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Disperindag Tahun 2014-2020 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh Disperindag sebesar 20 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada Disperindag Kabupaten Magetan pada tahun 2014-2020 adalah sebagaimana tabel berikut TC 24 :

Tabel T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran**	**731,000,000**	**570,182,200**	**692,861,067**	**534,026,382**	**95%**	**94%**	
	Kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran	Kedtersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	566,000,000	475,182,200	528,189,208	439,486,438	**93%**	**92%**	
	Kegiatan Pelayanan Perjalanan Perjalanan Dinas		165,000,000	95,000,000	164,671,859	94,539,944	**100%**	**100%**	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase Ketersediaan Saranan dan Prasarana Aparatur**	**535,500,000**	**238,248,800**	**520,577,620**	**236,680,589**	**97%**	**99%**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	283,000,000	0	276,340,400	0	**98%**	**98%**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	97,500,000	110,000,000	94,264,100	110,000,000	**97%**	**100%**	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan pasar	50,000,000	0	49,792,750	0	**100%**	**100%**	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	75,000,000	113,773,800	71,488,650	112,457,589	**95%**	**99%**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	30,000,000	14,475,000	28,691,720	14,223,000	**96%**	**98%**	
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor disperindag	0	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**		**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		0	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	

4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningakatan kualitas SDM PNS Disperindag**	**50,000,000**	**30,000,000**	**45,217,600**	**25,204,550**	**90%**	**84%**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningakatan kualitas SDM PNS Disperindag	30,000,000	5,000,000	29,996,350	1,492,550	**100%**	**30%**	
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan		20,000,000	25,000,000	15,221,250	23,712,000	**76%**	**95%**	
5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah laporan yang dibuat**	**29,500,000**	**40,000,000**	**27,711,500**	**35,846,500**	**69%**	**90%**	
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	20,000,000	20,000,000	19,388,000	19,678,500	**97%**	**98%**	
	Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang dibuat	9,500,000	20,000,000	8,323,500	16,168,000	**42%**	**81%**	
6	**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Jumlah Survey IKM**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,485,150**	**19,669,600**	**97%**	**98%**	
	Survey IKM	Jumlah Survey IKM	20,000,000	20,000,000	19,485,150	19669600	**97%**	**98%**	
7	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**Kontribusi sector industry terhadap PDRB**	**230,000,000**	**3,787,886,500**	**222,029,512**	**2,878,637,200**	**6%**	**76%**	
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah KUB yang mendapat pembnaan, bantuan peralatan dan ujicoba produk	230,000,000	495,886,500	222,029,512	341,380,650	**97%**	**69%**	
	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang dibina	0	0	0	0	**#DIV/0!**	**#REF!**	
	Revitalisasi sentra IKM		0	3,292,000,000	0	2,537,256,550	**#DIV/0!**	**0.7707**	
8	**Program pembinaan industri**	**Jumlah kelompok tani tembakau yang menjalin kemitraan dengan pabrik rokok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#REF!**	
	Pengembangan industri tembakau dan kadar tar dan nkotin rendah melalui penerapan GMP	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	0	0	**#DIV/0!**	**#REF!**	
9	**Program pembinaan lingkungan sosial**	**Jumlah kelompok alih profesi yang dibina**	**1,325,000,000**	**900,000,000**	**1,287,788,200**	**842,428,696**	**97%**	**94%**	
	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	0	0			
	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industry hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui bantuan modal dan sarana produksi	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	0	0			
	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	0	0			

	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat		675,000,000	500,000,000	646,492,400	481,552,050	96%	96%	
	Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi	430,000,000	150,000,000	430,000,000	144,002,000	100%	96%	
	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Fasilitasi Pmeran produk kerajinan dan hasil pelatihan	220,000,000	150,000,000	211,295,800	132,440,000	96%	88%	
	Pemetaan industri hasil tembakau	Dokumen pemetaan	0	100,000,000	0	84,434,646	#DIV/0!	84%	
10	**Program Penataan Struktur Industri**	**Terbangunnya Kawasan LIK II**	**100000000**	**50000000**	**34,469,194**	**34,320,000**	**0.34469**	**0.6864**	
	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry	Terbangunnya Kawasan LIK II	100,000,000	50,000,000	34,469,194	34320000	0.34469	0.6864	
11	**Program Pengembangan sentra sentra industri potensial**	**Tersedianya data dan peta potensi**	**40,000,000**	**0**	**33,941,300**	**0**	**0.84853**	**#DIV/0!**	
	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra IKM potensial	40,000,000	0	33,941,300	0	85%	#DIV/0!	
12	**Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi**	**Prosentase peningkatan nilai produksi atas implementasi iptek system produksi**	**250,000,000**	**293,137,800**	**227,013,900**	**284,262,956**	**91%**	**97%**	
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi		130,000,000	98,000,000	117,534,850	95,063,000	90%	97%	
	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Uji limbah industri dan fasilitasi HAKI/merk, BPOM, Sertifikasi Halal	120,000,000	95,137,800	109,479,050	91,233,556	91%	96%	
	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pembinaan dan bantuan mesin	0	100,000,000	0	97,966,400	#DIV/0!	98%	
13	**Program peningkatan kemampuan teknologi industri**	**Prosentase IKM yang menerapkan teknologi produksi bersih, sehat dan ramah lingkungan**	**430,000,000**	**450,380,000**	**377,198,482**	**430,617,100**	**88%**	**96%**	
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Diklat dan bantuan peralatan produksi	100,000,000	150,000,000	81,729,182	141,690,150	82%	94%	
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Diklat dan bantuan peralatan produksi	280,000,000	250,380,000	256,787,300	241,697,350	92%	97%	
	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Sosialisasi SNI	50,000,000	50,000,000	38,682,000	47,229,600	77%	94%	
14	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	**PDRBsektor perdagangan**	**10,288,270,000**	**13,053,882,200**	**5,759,828,150**	**12,596,973,209**	**56%**	**96%**	
		Terbangunnya pasar sayur magetan							
	Pengembangan pasar dan distrribusi barang/produk	Jumlah pedagang yang mengikuti bazaar murah dan pujasera	240,000,000	156,371,600	235,504,900	153,836,100	98%	98%	
	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah pedagang yang mengikuti pasar lelang dan fasilitasi pedagang melalui misi dagang	50,000,000	0	46,711,400	0	93%	#DIV/0!	
	Pendataan pedagang di pasar tradisional	Tersedianya data pedagang di pasar tradisional	0	0	0	0			
	Peningktan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Monitoring harga sembako	20,000,000	25,000,000	18,448,400	24,895,000	92%	100%	
	Pemeliharaan gedung pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	0	200,000,000	0	193,276,940	#DIV/0!	97%	
	Pembangunan pasar	Tersedianya pasar daerah yang representatif	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Rehabilitasi pasar	Rehabilitasi Pasar	6,600,000,000	7,850,455,500	4,936,681,372	7,169,740,919	75%	91%	
	Revitalisasi 8 pasar daerah	Revitalisasi pasar	1,648,270,000	727,939,000	64,904,704	683,519,065	4%	94%	

	Pembangunan Pasar Hewan	Pembangunan pasar hewan	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisonal	Pembuatan dokumen lingkungan bagi pasar tradisional	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Temu usaha	30,000,000	0	24,850,750	0	83%	#DIV/0!	
	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Promosi perdagangan / pameran	450,000,000	400,000,000	432,726,624	400,000,000	96%	100%	
	Operasionalisasi pasar	0	1,250,000,000	1,474,116,100	0	1,292,363,750	0%	88%	
	Pemeliharaan pasar hewan	0	0	20,000,000	0	19,766,850	#DIV/0!	99%	
	Rehabilitasi pasar DID	0	0	2,200,000,000	0	2,659,574,585	#DIV/0!	121%	
	Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah	0	100,000,000	0	92,425,800	0	92%	#DIV/0!	
15	**Program peningkatan dan pengembangan eksport**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
16	**Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Prosentase barang dagang tidak sesuai ketentuan**	**2,147,500,000**	**414,060,000**	**1,957,909,702**	**397,140,140**	91%	96%	
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan mamin kadaluarsa	100,000,000	100,000,000	77,038,850	97,292,050	77%	97%	
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah waji tera yang menera ulang UTTP nya	628,000,000	225,000,000	567,800,170	214,707,890	90%	95%	
	Kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi	Pengawasan peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Biaya umum dan pendampingan DAK Perdagangan		150,000,000	0	132,630,682	0	88%	#DIV/0!	
	Kegiatan Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	Jumlah Sarana dan Prasarana	1,269,500,000	89,060,000	1,180,440,000	85,140,200	93%	96%	
17	**Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan**	**Cakupan PK5 yang dibina**	**90,000,000**	**193,575,750**	**83,305,250**	**190,818,050**	93%	99%	
	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Penyuluhan terhadap pedagang kakilima	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pendataan pedagang kakilima	Tersedianya data pedagang kakilima	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Uji lab sample mamin	30,000,000	17500000	29,299,750	17010000	0.97666	0.972	
	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Sosialisasai dan penyuluhan PK5	60,000,000	176,075,750	54,005,500	173,808,050	90%	99%	
18	**Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**	Monitoring rokok	**100,000,000**	**100,000,000**	**95,085,400**	**95,398,450**	95%	95%	
	Pengumpulan informasi hasil temabakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjaualan eceran	Monitoring rokok	100,000,000	100,000,000	95,085,400	95,398,450	95%	95%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- ✓Tingginya persaingan usaha (Kegiatan usaha hingga kini semakin maju, barang hasil produksi semakin beraneka ragam, desain yang bervariasi dan kualitas yang baik, Jika kegiatan usaha dimagetan perkembangnya lambam, maka hasil produk dari daerah lain maupun produk dari luar negeri menjadi persaingan yang besar , sampai dengan saat ini barang - barang dari luar daerah maupun dari luar negeri telah banyak masuk di daerah magetan dan laku pesat dipasaran.
- ✓Pesatnya persaingan teknologi industri (Teknologi industri semakin maju, sehingga bagi IKM yang masih menggunakan peralatan tradisonal akan ketinggalan dan barang produknya tidak laku dipasaran dan mengalami kegagalan)

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

- ✓Adanya permintaan pasar yang cukup tinggi
- ✓Bahan baku yang yang berasal dari SDA yang cukup tersedia untuk diolah
- ✓Letak Kab. Magetan berada pada ujung barat Propinsi Jawa Timur dan sangat dekat dengan Propinsi Jawa Tengah
- ✓Meningkatnya industry pariwisata di kabupaten magetan menjadi peluang pasar bagi Industri Kecil.
- ✓Sudah Adanya Gedung UPTD Metrologi untuk pelayanan Tera / Tera Ulang bagi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

3.1.1 Perdagangan

1)Munculnya PKL baru yang Berjualan Di Tempat yang Tidak Sesuai dengan Peruntukannya

Pertumbuhan daerah yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan banyak penduduk angkatan kerja beralih ke sektor informal. Salah satu usaha sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam perkembangannya, banyak PKL baru yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini kedepannya dapat menimbulkan efek domino apabila tidak dilakukan langkah antisipasi.

2)Kurangnya Tenaga Penera untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP

Tenaga Penera di Disperindag baru ada 3 orang sedangkan harus melayani tera /tera ulang di setiap Kecamatan di Kabupaten Magetan dan pelayanan di kantor UPTD Metrologi. Hal tersebut menjadi kendala kurang maksimalnya pelayanan Tera / Tera Ulang yang berpengaruh pada target PAD.

3)Masih Kurangnya Produk IKM yang Masuk Pasar Modern

Masuknya Industri Kecil dan Menengah ke pasar modern bertujuan agar produk IKM bisa dijual secara mudah dan meluas. Dengan masuknya IKM ke pasar modern diharapkan IKM dapat lebih siap menghadapi persaingan pasar bebas, mulai dari kualitas sampai dengan kreativitas dalam pengolah produk. Pada tahun 2019 sudah ada 18 produk IKM yang masuk pasar modern, namun karena dampak pandemi saat ini sudah tidak ada produk IKM masuk ke pasar modern. Sehingga kedepannya perlu dilakukan inovasi maupun bantuan peralatan dan modal agar produk IKM yang masuk ke pasar modern semakin meningkat.

4)Masih kurangnya sarana promosi bagi Industri-industri kecil yang merupakan produk unggulan Kab. Magetan.

Produk unggulan merupakan produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Setelah kualitas produk sudah kompetitif akan tetapi masih ada permasalahan di pemasaran. Oleh karena itu, butuh lebih banyak sarana promosi untuk menghadapi persaingan global dengan

mengadakan Ivent-ivent baik diadakan sendiri di intern Kabupaten Magetan atau mengikuti di daerah – daerah lain.

5) Masih Kurangnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah dan Pasar Hewan di Kabupaten Magetan.

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Keberadaan pasar erat kaitannya dengan perekonomian daerah. Pasar dengan akses sarana dan prasarana memadai tentu akan meningkatkan kinerjanya sehingga juga dapat berimbas kepada perekonomian daerah. Meskipun pasar memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah, saat ini infrastruktur sarana dan prasarana pasar daerah dan pasar hewah di Kabupaten Magetan dinilai masih kurang hal ini disebabkan belum adanya pasar daerah dengan .

3.1.2 Perindustrian

1) Kurangnya Fasilitasi Merk/HAKI, SNI, Sertifikat Halal, *Nutrition Fact* Serta Desain Kemasan

Keberadaan IKM di pasar modern bertujuan agar produk IKM bisa dijual lebih mudah dan meluas. Dengan masuknya IKM ke pasar modern diharapkan IKM dapat lebih siap menghadapi persaingan pasar bebas, mulai dari kualitas sampai dengan kreativitas dalam pengolah produk. Namun demikian, saat ini produk IKM yang telah masuk ke pasar modern dinilai masih kurang. Hal tersebut diiringi dengan masih kurangnya fasilitasi Merk/HAKI, SNI, sertifikat halal, *nutrition fact*, serta desai kemasan.

2) Masih Kecilnya Pertumbuhan IKM

Industri kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Meningkatnya pertumbuhan IKM diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah. Namun demikian, Pertumbuhan industri kecil di Kabupaten Magetan pada tahun 2014-2016 masih relatif rendah, yaitu berkisar antara 0,5 % sampai 1,85 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 3,37%.

3) Masih Banyaknya IKM yang Belum Mendapatkan Pembinaan untuk Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Produktivitas industri kecil dan menengah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dari kemampuan teknologi industri. Teknologi yang ada saat ini dapat meningkatkan hasil produksi sehingga produktivitas industri kecil dan menengah dapat meningkat. Meskipun memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan produktivitas IKM di Kabupaten Magetan, saat ini masih cukup banyak IKM yang belum mendapatkan pembinaan untuk peningkatan kemampuan teknologi industri.

4)Masih Kurangnya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM

Fasilitas sarana dan prasarana produksi juga memiliki andil dalam produktivitas industri kecil. Dengan sarana dan prasarana yang memadahi produksi dari industri kecil dapat lebih tinggi dari sebelumnya, Namun demikian, saat ini fasilitas sarana dan prasarana produksi bagi industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Magetan dinilai masih kurang.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB

DAN LEBIH SEJAHTERA"

Masyarakat Magetan yang ***SMART*** merupakan kepanjangan dari ***Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil*** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman NOW. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/ pendidikan memadai (*educated*) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap upaya-upaya pembaharuan dan perkembangan serta tidak apriori terhadap berbagai unsur kemajuan teknologi walaupun tetap bersikap skeptis dan selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (keimanan), peribadahan, tata hubungan keluarga dan sosial masyarakat, serta akhlak dan perilaku budi pekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling

bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terhasud bujuk rayu dan tipu muslihat yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampil merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola dan mengolah kesempatan/ peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin ***Mantab*** merupakan kepanjangan dari ***Mandiri, Lestari dan Bermartabat*** yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025. Periode pembangunan tahun 2019 – 2024 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005 – 2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pamantapan.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan/ andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang SMART.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusian dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus-ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ikut mensukseskan **Misi ke 1 (satu)** "Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil), **Misi ke 2 (dua**)*"Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah***".**

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyusun rencana pelaksanaan dalam Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Indsutri Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023:

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA						Urusan
Sebelum/ Sesudah Perubahan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
	Misi 1	**Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)**				
Sebelum Perubahan	Tujuan 1	Sasaran 1.3				
	Meningkatkan kualitas SDM.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan; Tingkat Pengangguran Terbuka	Pemberdayakan petani/buruh tani, peternak dan pembudidaya ikan, pedagang tradisional PK5 dan asongan dari kalangan warga miskin	Pembinaan dan pemberikan bantuan sarana produksi pertanian/ perkebunan, peternakan, perikanan, usaha perdagangan, industri kecil	PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN
	Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
Setelah Perubahan	Tujuan 1 (T1)	Sasaran T1.S3				
	Meningkatkan kualitas SDM.	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Angka Kemiskinan	Memberdayakan masyarakat miskin, Keluarga Sejahtera dan PMKS lainnya	Menyelenggarakan Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga	PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN
	Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	Misi 2	**Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah**				
Sebelum Perubahan	Tujuan 3	Sasaran 3.3				
	Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum)	Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan Daerah yang didukung oleh tripel agro (agrowisata, agroindustri dan agrobisnis)	Mengembangkan agroindustri pengolahan makanan produk lokal	INDUSTRI, PERDAGANGAN
	Indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini	Sasararan 3.4				
		Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan	Meningkatkan usaha perdagangan dengan mengutamakan penyerapan pasar terhadap produk lokal	Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pasar daerah terutama di kawasan yang mendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional	PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN
					Mendorong produk lokal memasuki pasar modern	PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN
Setelah Perubahan	Tujuan 3 (T3)	Sasaran T3.S1				
	Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum)	Meningkatkan industri pariwisata	Mengembangkan produk industry kecil pendukung pariwisata	PERINDUSTRIAN
	Indikator : Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Inflasi,		Nilai PDRB sektor perdagangan	Meningkatkan kegiatan perdagangan	Meningkatkan tata kelola perdagangan	PERDAGANGAN

	Indeks Gini					
	Misi 5	**Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil**				
Setelah Perubahan	Tujuan 7 (T7)	Sasaran T7.S1				
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintahan daerah	SEMUA PERANGKAT DAERAH/ PEMANGKU URUSAN
	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi					

3.3Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur lima tahun (Renstra) tahun 2014-2019 ke depan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan peningkatan nilai tambah industry, penguasaan teknologi industry dan penguatan struktur industry.

Tujuan 1: Meningkatkan daya saing industry manufaktur

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya perkembangan industry kecil dan menengah, nilai tambah industry berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industry dan kualitas SDM

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya standardisasi produk industry manufaktur sebagai factor penguat daya saing

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas

Tujuan 2: Meningkat kinerja ekspor non migas

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kinerja ekspor non igas yang berdaya saing, dan terciptanya pengendalian impor.

Misi 3 : Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatanefisiensi perdagangan dalam negeri

Tujuan 3 : Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Sasaran 4 : Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas system distribusi daerah, serta wira usaha baru sector perdagangan

Misi 4 : Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Tujuan 4 : Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Sasasarn 5 : Meningkatnya penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi local agribisnis, industry dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas :

1. Pengembangan agropolitan hortikultura;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
3. Pengembangan sentra industry;
4. Penataan kawasan wisata;
5. Penetapan kawasan lindung;
6. Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;
7. Pengembangan pusat kegiatan;
8. Pengembangan prasarana wilayah; dan

9.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

10.Pengembangan LIK 2

Kawasan industri adalah kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan kesediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur, perkembangan wilayah, industri menurut investasi, jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.

- Industri besar berupa industri gula dengan dukungan budidaya tebu meliputi :
  a. Pabrik Gula Redjosari berada di Kecamatan Kawedanan ; dan
  b. Pabrik Gula Purwodadie berada di Kecamatan Karangrejo
- Industri menengah berupa industri kulit meliputi :
  a. Kecamatan Magetan
  b. Kecamatan Ngariboyo
- Industri kecil dan rumah tangga terdiri atas :

  a.Industri batik meliputi:
  1. Industri batik Sidomukti di Kecamatan Ploasan
  2. Industri batik Pragak berada di Kecamatan Parang

3. Industri batik Pojok berada di Kecamatan Nguntoronadi
4. Industri batik Kepolorejo berada di Kecamatan Magetan
5. Industri batik Kepuhrejo berada di Kecamatan Takeran
6. Industri batik Gonggang berada di Kecamatan Poncol
7. Industri batik Kembangan berada di Kecamatan Sukomoro

b. Industri kerajinan genteng meliputi:

1. Kecamatan Maospati
2. Kecamatan Karas
3. Kecamatan Barat
4. Kecamatan Kawedanan
5. Kecamatan Bendo
6. Kecamatan Sukomoro
7. Kecamatan Ngariboyo

c. Industri kerajinan batubata meliputi :

1. Kecamatan Maospati
2. Kecamatan Karas
3. Kecamatan Barat
4. Kecamatan Kawedanan
5. Kecamatan Bendo
6. Kecamatan Sukomoro
7. Kecamatan Ngariboyo

d. Industri kerajinan gerabah meliputi :

1. Kecamatan Kawedanan
2. Kecamatan Lembeyan
3. Kecamatan Parang

Sentra industri kecil meliputi :

a. Sentra kerajinan kulit berada di Kecamatan Magetan dan Ngariboyo
b. Sentra kerajinan bambu berada di Kecamatan Magetan
c. Sentra kerajinan gamelan berada di Kecamatan Karangrejo
d. Sentra makanan khas Magetan berada di Kecamatan Magetan
e. Industri ayam panggang Gandu berada di Kecamatan Karangrejo
f. Sentra kerajinan batik Sidomukti berada di Kecamatan Plaosan

Kawasan peruntukan pengembangan sektor informal terdiri atas :

a. Penyediaan ruang kegiatan sektor informal atau pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan
b. Penataan dan revitalisasi kawasan pedagang kaki lima pada pusat kegiatan perkotaan dan ruas jalan

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan dokumen KLHS RPJMD TAhun 2018-2023, **Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkai**tan dengan tupoksi Di**nas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Magetan**. Indikator-indikator SDGs dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
	9.3 Meningkatkan akses industry dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategi

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

1. Era revolusi industri ke-4 (Industry 4.0) akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin

atau robot semua serba *Internet of/for Things, dan masih sangat kecilnya pengetahuan dan kesiapan industry kita* berinovasi menyesuaikan dengan era indutri 4.0

2.Perlunya peningkatan SDM (pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan termasuk penguasaan iptek) bagi pengusaha IKM, UKM dan IRT sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi/dalam mengelola usahanya.

3.Masih perlunya Pengembangan Industri kecil penunjang Pariwisata dengan fokus pada kemampuan pengembangan desain produk. (desain belum up date atau belum mengikuti perkembangan dan belum rapi).

4.Masih rendahnya kemampuan penerapan teknologi industry terutama industry kecil di kabupaten magetan mengakibatkan kurang bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain

5.Pembangunan sentra – sentra ekonomi/penumbuhan usaha baru agar memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya.

6.Masih rendahnya ketrampilan kerja kelompok alih profesi(tenaga kerja dan masyarakat) yang dibina dan diberikan bantuan sarana produksi

7.Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa dana maupun berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terjadi pemasalahan ketika akan memberi bantuan

8.Masih perlunya Penataan, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Industri kecil dan menengah utamanya industri unggulan yang dimiliki Kab. Magetan yaitu Industri kecil pengolahan kulit menjadi industri unggulan dan memiliki keterkaitan proses hulu hilir indusri, dimana Industri kecil penyamakan kulit sebagai industri hulunya dan industri kecil kerajinan kulit sebagai industri hilirnya.

9.Ipal mengolahan Limbah Industri Penyamakan Kulit belum memadai sehingga sangat mencemari dan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup (Ancaman pencemaran lingkungan dari industri kulit)

10.Fasilitasi kepada IKM dan UKM tentang adanya pameran - pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi IKM, baik pameran yang diadakan di Kab. Magetan maupun diluar Kab. Magetan

11.Pembangunan dan rehabilitasi pasar – pasar milik Pemkab maupun pasar - pasar desa sehingga memberi kenyaman bagi pedagang dan pembeli ketika bertransaksi

12. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menjamin barang dagangannya layak konsumsi sehingga konsumen terjamin keamanannya.

13.Perluanya monitoring peredaran barang kena cukai ilegal sehingga meminimalisir kerugian penerimaan negara dibidang cukai.

14.Masih rendahnya kemampuan Pedagang kaki Lima dan Asongan untuk berdagang sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T.C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2019-2023

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan			1.1	Nilai PDRB sektor perdagangan	2,088,786,17 Juta Rupiah	2,198,490,29 Juta Rupiah	2,308,194,41 Juta Rupiah	2,417,898,53 Juta Rupiah	2,527,602,65 Juta Rupiah
		1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Persestase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,08%	7,09%	7,10%	7,11%	7,15%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri			2.1	Nilai PDRB sektor Industri	728.005,46 Juta Rupiah	771,685.79 Juta Rupiah	817,986,93 Juta Rupiah	867,066,15 Juta Rupiah	919,090,12 Juta Rupiah
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,180 %	0,180 %	0,190 %	0,190 %	0,200 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

1 Mengembangkan kapasitas pedagang dan saranaprasarana pasar tradisional

2 Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan

3 Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang

4 Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan

5 Membina PK5 dan Asongan

5.2.Kebijakan

1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional

2 Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan

3 Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional

4 Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan

5 Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil

6 Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM

7 Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan

8 Memberikan Pembinaan dan Bantuan sarana perdagangan kepada PK5 dan Asongan.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2019-2023

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan	1.1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Mengembangkan kapasitas pedagang dan saranaprasarana pasar tradisional	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
						1.1.1.2	Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
				1.1.2	Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	1.1.2.1	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
				1.1.3	Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	1.1.3.1	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
				1.1.4	Membina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.1.4.1	Memberikan Pembinaan dan Bantuan Sarana perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
						2.1.1.2	Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
						2.1.1.3	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada table T-C.27 berikut ini:

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan	**Meningkatnya daya saing sektor perdagangan**	**1.1.1**	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau || %	5	56	2,147,500,000	54	490,000,000							46	2,637,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau || unit	3	4	100,000,000	4	100,000,000							20	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UTTP yang ditera || unit	3,000	23,000	628,000,000	24,000	350,000,000							28,000	978,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.3	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perdagangan	Persentase Pelaksanaan kegiatan DAK Perdagangan || %	0	100	150,000,000	0	0							100	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan	Jumlah Pedagang yang diberikan sosialisasi || Pedagang	0	0	0	60	40,000,000							300	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.5	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	||			1,269,500,000		0								1,269,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah UTTP Yang Ditera						100	85,000,000	100	150,000,000			100	235,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera**						**100**	**85,000,000**	**100**	**150,000,000**			**100**	**235,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.06.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera						8,000	85,000,000	9,000	100,000,000			17,000	185,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera						0	0	18	50,000,000			18	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang ditera || %										100	165,000,000	100	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera || %**										**100**	**165,000,000**	**100**	**165,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.06.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang || unit										20,000	110,000,000	20,000	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina || orang										500	55,000,000	500	55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.2	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	Jumlah pelaku usaha perdagangan || unit	7,216	7,723	690,000,000	8,269	900,000,000							10,163	4,455,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.2.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera || Kali	6	7	140,000,000	6	180,000,000							30	930,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.2.2	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang || IKM	20	20	30,000,000	30	45,000,000							140	220,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		1.1.2.3	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti pasar lelang dan misi dagang. || Pedagang	50	50	50,000,000	34	100,000,000							176	470,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.2.4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan (uji coba pasar)	Jumlah monitoring harga sembako || Kali	52	52	20,000,000	52	25,000,000							260	135,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.2.5	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran || Kali	12	12	450,000,000	12	550,000,000							60	2,700,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau						100	90,000,000	100	175.000.000			100	265,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi**						**100**	**70,000,000**	**100**	**145,000,000**			**100**	**215,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.04.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi						1	10,000,000	1	20,000,000			2	30,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumla						52	20,000,000	52	25,000,000			104	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

			Sistem Informasi Perdagangan	h pedagang yang diberikan sosialisasi																
		3.30.04.2.02.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi						1	40,000,000	3	100,000,000			4	140,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi**						**100**	**20,000,000**	**100**	**30,000,000**			**100**	**50,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.04.2.03.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi						2	20,000,000	3	30,000,000				50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau ||%										100	192,500,000	100	192,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis barang yang dipantau/ persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/ jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi ||%**										**100**	**159,500,000**	**100**	**159,500,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.04.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ||Laporan										3	22,000,000	3	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ||Laporan										52	27,500,000	52	27,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ||Laporan										4	110,000,000	4	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis barang yang dipantau/ persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/ jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi ||%**										**100**	**33,000,000**	**100**	**33,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.04.2.03.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 %||Laporan										3	33,000,000		33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05	Program Pengembangan Eksport	Persentase pelaksanaan pameran dan misi dagang						90	##########	90	#########			90	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pameran**						**90**	**100,000,000**	**90**	**150,000,000**			**90**	**250,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.05.2.01.3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran						12	100,000,000	12	100,000,000			24	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01.4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan						0	0	2	50,000,000			2	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05	Program Pengembangan Eksport	Jumlah Pelaksanaan Pameran||%										90	165,000,000	90	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Pameran||%**										**90**	**165,000,000**	**90**	**165,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.05.2.01.3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal ||Pelaku Usaha										12	110,000,000	12	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01.4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan ||Pelaku Usaha										6	55,000,000	6	55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	Persentase pelaksanaan pameran dan pembinaan pelaku usaha perdagangan						80	75,000,000	80	###########			80	190,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Pelaku usaha perdagangan**						**80**	**75,000,000**	**80**	**190,000,000**			**80**	**190,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.07.2.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran						5	65,000,000	8	150,000,000			13	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha perdagangan						20	10,000,000	20	40,000,000			40	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan || %										80	209,000,000	80	209,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Pelaku usaha perdagangan || %**										**80**	**209,000,000**	**80**	**209,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.07.2.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota || UMKM										12	165,000,000	12	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi || UMKM										20	44,000,000	20	44,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.3	**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**	Cakupan PK5 yang dibina dan didata || %	5	6	90,000,000	7	245,000,000							8	640,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.3.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan || Pedagang	90	400	60,000,000	400	210,000,000							2,000	460,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.3.2	**Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan**	Jumlah Pedagang yang diawasi mutu dagangannya || Pedagang	0	60	30,000,000	60	35,000,000							300	180,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.4	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai	persentase peredaran barang kena cukai ilegal	0	0	100,000,000	0	100,000,000							0	550,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

			ilegal Bidang Perdagangan	yang terpantau || %															
		1.1.4.1	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah monitoring hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai || Kali	12	12	100,000,000	12	100,000,000							60	550,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5	Program Peningkatan Pasar Daerah	Persentase bangunan dan sarana penunjang pasar dalam kondisi baik || %	40	50	8,848,270,000	55	10,370,000,000							75	46,268,270,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.1	Operasionalisasi Pasar	Jumlah Peyediaan biaya Operasional sarana dan prasarana pasar || Bulan	12	12	1,100,000,000	12	1,250,000,000							60	6,950,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.2	Rehabilitasi Pasar	Jumlah Pasar yang di rehabilitasi || unit	8	4	6,000,000,000	2	5,000,000,000							12	23,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.3	Pembangunan Pasar Hewan	Jumlah Pasar Hewan yang dibangun || unit	1	0	0	2	4,000,000,000							7	14,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.4	Revitalisasi Pasar (DAK)	||			1,548,270,000		0								1,548,270,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.5	Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah	Jumlah penyusunan dokumen pemetaan pasar daerah; || dokumen	0	1	100,000,000	0	0							2	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.6	**Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pasar**	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Bidang Pasar || %	0	100	100,000,000	100	0							100	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.7	Pemeliharaan Gedung Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara || unit	3	0	0	4	100,000,000							8	400,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.5.8	Pemeliharaan Pasar Hewan	Jumlah pasar hewan yang dipeihara || unit	2	0	0	3	20,000,000							15	70,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi						80	7,831,775,000	85	8,016,000,000			85	15,863,869,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase peningkatan sarana distribusi**						**80**	**7,831,775,000**	**85**	**7,941,000,000**			**85**	**15,772,775,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.03.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan dipelihara						5	7,191,000,000	5	7,191,000,000			10	14,382,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar						12	640,775,000	12	750,000,000			24	1,390,775,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase peningkatan sarana distribusi**						**80**	**16,094,000**	**85**	**75,000,000**			**85**	**91,094,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.03.2.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan						25	16,094,000	50	75,000,000			75	91,094,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi || %										85	8,817,600,000	85	8,817,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase peningkatan sarana distribusi || %**										**85**	**8,735,100,000**	**85**	**8,735,100,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.03.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan || Unit										6	7,910,100,000	6	7,910,100,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan || Unit										21	825,000,000	21	825,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase peningkatan sarana distribusi || %**										**85**	**82,500,000**	**85**	**82,500,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.03.2.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan || dokumen										1	82,500,000	1	82,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau (%)	0	0	100,000,000	0	100,000,000							0	550,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3
		3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)						75	75,000,000	75	110,000.000			75	185,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau**						**75**	**75,000,000**	**75**	**110,000,000**			**75**	**185,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.02.2.06.1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau						0	0	12	35,000,000			12	35,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.06.3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau						12	75,000,000	12	75,000,000			24	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

			(PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																
		3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau || %										75	158,350,000	75	158,350,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin || %**										**75**	**13,500,000**	**75**	**13,500,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.02.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik || dokumen										1	13,500,000	1	13,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG || %**										**75**	**10,000,000**	**75**	**10,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.02.2.02.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau || dokumen										1	10,000,000	1	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW || %**										**75**	**13,500,000**	**75**	**13,500,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri || dokumen										1	13,500,000	1	13,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau || %**										**75**	**121,350,000**	**75**	**121,350,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.30.02.2.06.1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya ||Laporan										8	38,850,000	8	38,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.30.02.2.06.3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) ||Laporan										8	82,500,000	8	82,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek || %	100	90	250,000,000	90	550,000,000							90	2,630,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.1.1	**Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas**	Jumlah Industri Kecil yg memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan Design Kemasan || IKM	30	30	120,000,000	35	200,000,000							185	1,075,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.1.2	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pengembangan tentang managemen teknologi industri || IKM	0	0	0	55	200,000,000							190	825,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.1.3	**Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi**	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan || IKM	26	80	130,000,000	30	150,000,000							200	730,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek						0		90	100,000,000			90	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**90**	**100,000,000**			**90**	**100,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan						0	0	30	100,000,000			30	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek || %										90	110,000,000	90	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek || %**										**90**	**110,000,000**	**90**	**110,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	

		3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota || dokumen										1	110,000,000	1	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri || %	50	70	230,000,000	75	250,000,000							90	1,325,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Industri Kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk || IKM	6	7	230,000,000	30	250,000,000							142	1,325,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri || %	90	92	330,000,000	94	710,000,000							100	3,335,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.3.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yajg mendapatkan pembinaan dan pelatihan || IKM	0	0	0	100	300,000,000							460	1,350,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.3.2	**Pengembangan dan pelayanan teknologi industri**	Jumlah kelompok Industri Kecil yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi melalui bimtek dan bantuan sarana	114	95	280,000,000	71	300,000,000							40	1,480,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

				prasarana || IKM															
		2.1.3.3	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan sosialisasi standart produksi dan fasilitasi perolehan SNI dan HKI || IKM	40	40	50000000	40	50000000							200	250000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.3.4	**Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur**	Jumlah Industri Kecil yang mengikuti sosialisasi standarisasi || IKM	0	0	0	40	60000000							160	255000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perkembanganpelaku usaha industri						90	4,898,470,000	90	18,261,600,000			90	23,160,070,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelakau usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang**						**90**	**4,898,470,000**	**90**	**18,261,600,000**			**90**	**23,160,070,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.02.2.01.2	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri**	**Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan**						**15;13**	**471,600,000**						**471,600,000**		

		3.31.02.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pengembangan tentang teknologi industri						0	0	60	240,000,000			60	240,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelakau usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang						3;1;40;1	576,500,000	120	17,500,000,000			3;5;180;17	18,076,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelakau usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang						1;1	3,800,370,000	80	471,600,000			175;13	4,271,970,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri						1	50,000,000	1	50,000,000			2	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri || %										90	1,387,760,000	90	1,387,760,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, persentase perkembangan pelaku usaha industri, persentase industri kecil yang menerapkantek nologi industri, jumlah sentra industri kecil yang berkembang || %**										**90**	**1,387,760,000**	**90**	**1,387,760,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.02.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan													**0**		
		3.31.02.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri || %										4	264,000,000	4	264,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri || %										1	550,000,000	1	550,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta										13	518,760,000	13	518,760,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

				Masyarakat || %															
		3.31.02.2.01.6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri || %										1	55,000,000	1	55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri Kecil yang berkembang || sentra	10	10	40000000	10	50000000							10	240000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.4.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri potensial yang dilakukan pendataan Industri Kecil || sentra		10	40000000	10	50000000							50	240000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	persentase Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi || %	24	80	925000000	85	1950000000							100	8065000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.5.1	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih || kelompok	117	7	505000000	9	600000000							43	2905000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.5.2	**Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat**	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi || kelompok	4	5	250000000	8	200000000							37	1190000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.5.3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasi lpelatihan || kelompok	14	14	170000000	14	150000000							73	970000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.5.4	**Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar**	Jumlah Pasar yang dipelihara/rehab || unit	0	0	0	1	1000000000							4	3000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)						90	570,000,000	90	300,000,000			90	870,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi**						**90**	**570,000,000**	**90**	**300,000,000**			**90**	**870,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.04.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi						2;60	270,000,000	80	270,000,000			2;220	540,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi						100	300,000,000	100	30,000,000			200	330,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi|| %										90	330,000,000	90	330,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi|| %**										**90**	**330,000,000**	**90**	**330,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	

		3.31.04.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) || dokumen										2	297,000,000	2;220	297,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas || dokumen										1	33,000,000	1	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.6	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II || Ha	0		0	5	5000000000							5	5000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.6.1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Luas Lahan yang dibebaskan || Ha		0	0	5	5000000000							5	5000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya kelancaran Program/kegiatan rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat || Skor	75	75.5	751000000	76	767320000							77.5	3850280000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran || %	90	100	566000000	100	577320000							100	2875280000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase jumlah pelayanan Perjalanan dinas || %	0	100	165000000	100	165000000							100	855000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		1.1.1.3	**Survey Kepuasan Masyarakat**	Indeks kepuasan masyarakat || dokumen	1	1	20000000	1	25000000							5	120000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31,01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat||Angka						75	8,914,227,687	75	9,092,674,687			75	18,006,902,374	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**389,153,000**	**75**	**428,100,000**			**75**	**817,253,000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	30,000,000	12	30,000,000			24	60,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						16;12	120,053,000	16	150,000,000			48;36	270,053,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	11,000,000	12	15,000,000			24	26,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	25,000,000	12	30,000,000			24	55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	19,600,000	12	19,600,000			24	39,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	36,000,000	12	36,000,000			24	72,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						100	147,500,000	100	147,500,000			200	295,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**1,193,442,000**	**75**	**1,193,442,000**			**75**	**2,386,884,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	255,500,000	12	255,500,000			24	511,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						35	20,000,000	35	20,000,000			70	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						12	917,942,000	12	917,942,000			24	1,835,884,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31,01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat||Skor										75	10,001,942,156	75	10,001,942,156	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi ||Skor**										**75**	**470,910,000**	**75**	**470,910,000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ||Paket										3	33,000,000	3	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ||Paket										6	165,000,000	48;36	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ||Paket										3	16,500,000	3	16,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ||Paket										12	33,000,000	12	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ||Paket										12	21,560,000	12	21,560,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3,31,01.2.01.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ||dokumen										40	39,600,000	40	39,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ||laporan										24	162,250,000	24	162,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**										**75**	**1,312,786,200**	**75**	**1,312,786,200**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ||laporan										12	281,050,000	12	281,050,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ||laporan										12	22,000,000	12	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ||laporan										12	1,009,736,200	12	1,009,736,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi || %	90	95	535000000	95	3265000000							95	4755000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2.1	Pembangunan gedung kantorr	terbangunnya gedung kantor Disperindag || gedung	1	0	0	1	2400000000							1	2400000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		2.1.2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional || unit	0	3	300000000	1	600000000							2	900000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara || unit	22	12	75000000	21	80000000							96	420000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2.4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor || unit	72	13	80000000	20	105000000							93	485000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara || unit	54	54	30000000	54	30000000							54	150000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.1.2.6	**Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor**	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara || unit	1	1	50000000	1	50000000							8	400000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**79,600,000**	**75**	**199,600,000**			**75**	**279,200,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						2	45,000,000	2	45,000,000			4	90,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						19	34,600,000	19	34,600,000			38	69,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						0	0	1	80,000,000			1	80,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrsaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						0	0	1	40,000,000			1	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi ||Skor**										**75**	**219,560,000**	**75**	**219,560,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ||Unit										1	49,500,000	1	49,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ||Unit										6	38,060,000	6	38,060,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ||Unit										1	88,000,000	1	88,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrsaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ||Unit										1	44,000,000	1	44,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi || %	75	75	50000000	75	55000000							75	270000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.1.3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yg ikut diklat || PNS	2	5	30000000	5	30000000							25	150000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.1.3.2	**Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek || PNS	35	30	20000000	30	25000000							150	120000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**20,000,000**	**75**	**35,000,000**			**75**	**55,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						2	10,000,000	18	15,000,000			20	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						35	10,000,000	35	20,000,000			70	30,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi ||Skor**										**75**	**38,500,000**	**75**	**38,500,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ||Orang										18	16,500,000	18	16,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ||Orang										35	22,000,000	35	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		4.1.4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan || %	100	100	10000000	100	20000000							100	90000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		4.1.4.1	**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**	jumlah laporan monev || laporan	3	3	10,000,000	3	20000000							15	90000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		5.1.5	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah || %	100	100	20000000	100	25000000							100	120000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		5.1.5.1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan laporan keuangan yang	9	11	20,000,000	11	25,000,000							55	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

			Capaian Kinerja Perangkat daerah	dihasilkan. || laporan															
		3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**30,000,000**	**75**	**33,000,000**			**75**	**63,000,000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						6	7,000,000	6	10,000,000			12	17,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						1;7	23,000,000	7	23,000,000			3;21	46,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**6,316,067,687**	**75**	**6,317,567,687**			**75**	**12,633,635,374**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						100	6,312,567,687	100	6,312,567,687			200	12,625,135,374	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						2	3,500,000	2	5,000,000			4	8,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi**						**75**	**885,965,000**	**75**	**885,965,000**			**75**	**1,771,930,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.04.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						100	865,965,000	100	865,965,000			200	1,731,930,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						100	20,000,000	100	20,000,000			200	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi ||Skor**										**75**	**36,300,000**	**75**	**36,300,000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ||dokumen										7	11,000,000	7	11,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

		3.31.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ||laporan									7	25,300,000	3;21	25,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi ||Skor**									**75**	**6,949,324,456**	**75**	**6,949,324,456**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ||Orang /Bulan									62	6,943,824,456	62	6,943,824,456	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ||laporan									2	5,500,000	2	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi ||Skor**									**75**	**974,561,500**	**75**	**974,561,500**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
		3.31.01.2.04.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah ||dokumen									2	952,561,500	2	952,561,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah ||dokumen									24	22,000,000	24	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Total						**15,016,770,000**		**24,747,320,000**		**22,639,472,687**		**36,645,274,687**		**21,537,152,156**		**59,125,841,374**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 :

Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan 8 tujuan dan 15 sasaran yang harus diwujudkan oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

Tujuan 1(T1) : Meningkatkan kualitas SDM

Sasaran T1.S3 : Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat

Indikator Sasaran : Angka Kemiskinan

Tujuan 3 (T3) : Memperkuat perekonomian daerah yang bderkualitas

Sasaran T3.S1 : Meningkatkankinerja sector unggulan

Indikator Sasaran : 1. Nilai PDRB sector pariwisata (nilai PDRB sector penyediaan akomodasi makan minum

2. Nilai PDRB sektor perdagangan (Juta Rp.)

Tujuan 7 (T7) : Meningkatkan tata krelola pemerintahan yang baik

Sasaran T7.S1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan efisien

Tabel T-C-28

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Magetan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	2019
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	**Perdagangan**							
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	1.979.082,05	2.088.786,17	2.198.490,29	2.308.194,41	2.417.898,53	2.527,602,65	2.527.602,65
	Persentase Pasar Kondisi Baik	40	50	55	60	70	75	75
	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah	0	0,84	0,86	0,88	0,89	0,91	0,91
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,06	7,08	7,09	7,1	7,11	7,15	7,15
	Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya	4,38	5,4	6,3	7,1	7,9	8,3	8,3
	Persentase Produk IKM yang Masuk Pasar Modern	-	10	20	23	28	32	32
2	**Perindustrian**							
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	0,17	0,175	0,18	0,185	0,19	0,2	0,2
	Nilai Produksi industri kecil	729.243.078.000	730.519.253.000	731.834.189.000	733.188.081.000	734.581.140.000	736.050.300.000	736.050.300.000

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN**

VISI : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

MISI : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dibidang perindustrian dan perdagangan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

NO.	*KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS*	*INDIKATOR KINERJA UTAMA*	*DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN*	*SUMBER DATA*	*PENANGGUNG JAWAB*
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{Jumah\ Usaha\ Perdagangan\ Tahun\ n - Tahun(n-1)}{Jumlah\ Usaha\ Perdagangan\ Tahun\ n-1} x\ 100\%$	Laporan program dan BPS	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil	$\frac{Jumlah\ Total\ Industri\ Tahun\ n-Tahun(n-1)}{Jumlah\ Total\ Industri\ Tahun\ n-1} x\ 100\%$	Laporan program dan BPS	Bidang Industri

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan dasar pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD oleh karena itu setiap bidang ,sub bidang dan staf dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsif-prinsif efektip,efisien,transparan,akuntabel dan partisipasif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dalam program –program yang tertuang dalam perubahan Renstra Dinas perindustrian dan Perdagangan ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan penting untuk memperhatikan keterpaduan dan siskronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur dinas Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk melaksanakan Program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam renstra dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan sebaik-baiknya
2. Renstra Dinas Perindustrian dan perdagangan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyususunan rencana Kerja tahunan (RENJA) Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Magetan.

Magetan, 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUCIPTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009